

RENJA 2020

***RENCANA
KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA BIMA
2020***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja ini sebagai amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020 ini dijadikan pedoman pelaksanaan program peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan Pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang -undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020 masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang. Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020 ini untuk dijadikan arahan dan acuan semua program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020.



Raba-Bima, April 2019

Kepala Dinas

Drs. Jufri, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591231 198505 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kota Bima merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bima. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Program Nasional berdasarkan RKP tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yaitu : Urusan Wajib

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah YANG TERKAIT KEWENAGAN TUGAS DAN FUNGSI DENGAN SEKTOR / SKPD (apabila ada)
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020
- 1.3.2. Tujuan Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kota Bima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Disnaker Kota Bima Tahun 2020

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Matriks Renja 2020

BAB IV. PENUTUP

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA
TAHUN 2018**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya dan Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Rerencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

2.01	2.01.1	1	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	301.577	100%	230.845.000	2 %	5.483.000	73 %	167.613.259	3,78 %	8.736.741	2,44 %	5.641.772	81 %	212.169.772	8.121	91,91	81,21	212.169.772	81,21	70353,43	
2.01	2.01.1	1	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit	16.577	2 Unit	50.000.000	- Unit	-	2 Unit	49.900.000	-	-	2 Unit	49.900.000	100	99,80	2	49.900.000	100,00	301019,48		
2.02	2.01.2	1	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit	70.000	10 Unit (LCD, Brankas dan Filling	73.150.000	- Unit (LCD, Brankas dan Filling	-	10 Unit (LCD, Brankas dan Filling	45.850.000	-	-	3 Unit (LCD, Brankas dan Filling Kabinet dan Kursi	22.150.000	10	92,96	13	68.000.000	92,86	97142,86		
2.01	2.01.1	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	35.000	1 Unit	10.145.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	2.600.000	1 Unit	2.545.000	1	100,00	1	10.145.000	100,00	28985,71		
2.01	2.01.1	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak yang digunakan operasional Kendaraan Dinas	3.000 Liter	30.000	1.200 Liter	21.600.000	212 Liter	3.483.000	315 Liter	6.213.259	350 Liter	6.136.741	322 Liter	5.641.772	1.199	99,42	1.199	21.474.772	39,97	71582,57		
2.01	2.01.1	1	02	42	Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang Direhabilitasi	1 Unit	150.000	1 Unit	75.950.000	- Unit	-	1 Unit	62.650.000	-	-	-	-	1	82,49	1	62.650.000	100,00	41766,67		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			91,91			212.169.772				
2.01	2.01.1	1	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100% <td>30.600 <td>100% <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	30.600 <td>100% <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	100% <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	30.600.000 <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	100,00 % <td>30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	30.600.000 <td>- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	- % <td>- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	- % <td>- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	- <td>100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td></td>	100,00 % <td>30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td></td>	30.600.000 <td>10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td></td>	10.000 <td>100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td></td>	100,00 <td>100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td></td>	100,00 <td>30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td></td>	30.600.000 <td>100,00 <td>100000,00</td> </td>	100,00 <td>100000,00</td>	100000,00	
2.01	2.01.1	1	03	05	Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Kaun Temun yang tersedia	35 Orang	20.400	35 Stel /Org	20.400.000	- Org	-	35 Stel /Org	20.400.000	-	-	-	-	35	100,00	35	20.400.000	100,00	100000,00		
2.02	2.01.2	1	03	06	Pengadaan Pakain Olahraga	Jumlah seragam Olahraga yang tersedia	35 Orang	10.200	35 Stel /Org	10.200.000	- Org	-	35 Stel /Org	10.200.000	-	-	-	-	35	100,00	35	10.200.000	100,00	100000,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00			30.600.000				
2.01	2.01.1	1	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja	100% <td>185.656.000 <td>100% <td>180.750.000 <td>16,60 % <td>30.000.000 <td>18,53 % <td>33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	185.656.000 <td>100% <td>180.750.000 <td>16,60 % <td>30.000.000 <td>18,53 % <td>33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	100% <td>180.750.000 <td>16,60 % <td>30.000.000 <td>18,53 % <td>33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	180.750.000 <td>16,60 % <td>30.000.000 <td>18,53 % <td>33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	16,60 % <td>30.000.000 <td>18,53 % <td>33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	30.000.000 <td>18,53 % <td>33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	18,53 % <td>33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	33.500.000.000 <td>32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	32,42 % <td>58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	58.600.000 <td>31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	31 % <td>56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	56.500.000 <td>99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td></td>	99 % <td>178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td></td>	178.600.000 <td>9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td></td>	9.881 <td>98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td></td>	98,81 <td>98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td></td>	98,81 <td>178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td></td>	178.600.000 <td>98,81 <td>96,20</td> </td>	98,81 <td>96,20</td>	96,20	
2.01	2.01.1	1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan kinerja SKPD	4 Dok/ Keg	50.000	1 Dok/ Keg	25.000.000	- Dok/ Keg	-	Dok/ Keg	-	2 Dok/ Keg	12.500.000	2 Dok/ Keg	12.500.000	4	100	4,00	25.000.000	100	50.000		
2.01	2.01.1	1	06	03	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen/ Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	32.000	1 Dok	16.000.000	- Dok	-	Dok	-	1 Dok	16.600.000	-	-	1	100	1,00	16.600.000	100	51.875		
2.01	2.01.1	1	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	32.000	1 Dok	16.000.000	- Dok	-	Dok	-	1 Dok	16.000.000	1 Dok	16.000.000	1	100	1,00	16.000.000	100	50.000		
2.01	2.01.1	1	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DP/PA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA), Dokumen Rencana Kerja dan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	5 Dok	185.500.000	5 Dok	92.750.000	3 Dok	30.000.000	- Dok	2.500.000	1 Dok	29.500.000	1 Dok	28.000.000	5	97,04	5	90.000.000	100,00	48,52		
2.01	2.01.1	1	06	06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah Dokumen/ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai ketentuan	2 Dok	42.000	2 Dok	31.000.000	- Dok	-	2 Dok	31.000.000	-	-	-	2	100,00	2	31.000.000	100,00	31.000,002			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			99			178.600.000				
2.01	2.01.1	1	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	100% <td>354.000 <td>60 <td>Orang</td> <td>221.703.000 <td>- % <td>-</td> <td>14,89 % <td>33.004.000.000</td> <td>42,63 % <td>94.509.991</td> <td>40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	354.000 <td>60 <td>Orang</td> <td>221.703.000 <td>- % <td>-</td> <td>14,89 % <td>33.004.000.000</td> <td>42,63 % <td>94.509.991</td> <td>40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td></td></td></td></td></td></td>	60 <td>Orang</td> <td>221.703.000 <td>- % <td>-</td> <td>14,89 % <td>33.004.000.000</td> <td>42,63 % <td>94.509.991</td> <td>40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td></td></td></td></td></td>	Orang	221.703.000 <td>- % <td>-</td> <td>14,89 % <td>33.004.000.000</td> <td>42,63 % <td>94.509.991</td> <td>40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td></td></td></td></td>	- % <td>-</td> <td>14,89 % <td>33.004.000.000</td> <td>42,63 % <td>94.509.991</td> <td>40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td></td></td></td>	-	14,89 % <td>33.004.000.000</td> <td>42,63 % <td>94.509.991</td> <td>40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td></td></td>	33.004.000.000	42,63 % <td>94.509.991</td> <td>40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td></td>	94.509.991	40 % <td>88.214.009</td> <td>97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td> </td>	88.214.009	97 % <td>215.728.000</td> <td>162</td> <td>97,30</td> <td>97,30</td> <td>215.728.000</td> <td>97,30</td> <td>60940,11</td>	215.728.000	162	97,30	97,30	215.728.000	97,30	60940,11
2.01	2.01.1	1	15	01	Penyusunan Data Base tenaga kerja daerah	Terlaksananya pembiasaan lembaga pelatihan	1 Dok	14.000	1 Dok	23.983.000	Dok	-	1 Dok	23.975.000	-	-	-	1	100	1,00	23.975.000	100	171.250			
2.01	2.01.1	1	15	06	Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	40 Orang	170.000	40 Orang	181.050.000	Orang	-	4 Orang	9.029.000	4 Orang	94.509.991	20 Orang	76.669.009	28	100	28,00	180.208.000	70	106.005		
2.01	2.01.1	1	15	10	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi	14 LPTKS	170.000	14 LPTKS	16.670.000	LPTKS	-	LPTKS	-	-	14 LPTKS	11.545.000	14 LPTKS	11.545.000	69	14,00	14,00	11.545.000	100	6.791	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			97			215.728.000				

2.01	2.01.1	1	16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Meningkatnya Porseentase Pencari kerja yang	100%	144.000		100%	257.520.000	4,41 %	11.355.000	7,59 %	19.545.000	72,81 %	187.495.000	11,66 %	30.032.000	12,00 %	248.427.000	1.200	96,47	12,00	248.427.000	12,00	172518,75																	
2.01	2.01.1	1	02	Penyediaan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyediaan Informasi Bursa Tenaga Kerja	3 Keg	16.000		2 Keg	65.885.000	1 Keg	11.355.000	1 Keg	19.545.000		-	1 Keg	28.132.000	2 Keg	59.032.000	100	90	2,00	59.032.000	67	368.950																	
2.01	2.01.1	1	06	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis	Meningkatnya Wawasan dan pengetahuan serta pemahaman	50 TKM	8.000		50 TKM	174.980.000	- TKM	-	TKM		50 TKM	170.980.000	50 TKM	1.900.000	50 TKM	172.880.000	100	99	50,00	172.880.000	100	2.161.000																	
2.01	2.01.1	1	08	Pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia	Terlaksananya pembinaan masyarakat di bidang	88 Orang	120.000		9 perusahaan	16.655.000	- perusahaan	-	perusahaan		9 Perusa	16.515.000	-	-	68 Orang	16.515.000	756	99	68,00	16.515.000	77	13.763																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				96		248.427.000																					
2.01	2.01.1	1	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan Pengembangan Lembaga	100%	307.275		100%	316.646.000	15,00 %	47.495.000	13,05 %	41.324.000	34,19 %	108.269.000	34,97 %	110.731.500	28,05 %	307.819.500	2.805	97,21	28,05	307.819.500	28,05	100177,20																	
2.01	2.01.1	1	01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	33 Persahaan	120.514		33 Persaha	35.700.000	11 Persaha	8.420.000	17 Persaha	21.785.000		-	5 Persaha	5.325.000	33 Persahaan	35.530.000	100	100	33,00	35.530.000	100	29.482																	
2.01	2.01.1	1	02	Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian	Terlaksananya mediasi penyelesaian hubungan industrial	22 Kasus	50.164		20 Kegiatan	80.330.000	8 Kasus	39.075.000	6 Kasus	19.539.000	4 Kasus	15.859.000	2 Kasus	5.331.000	20 Kasus	79.804.000	100	99	20,00	79.804.000	91	159.086																	
2.01	2.01.1	1	03	Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan UMK dan Jaminan Sosial	254 Persahaan	46.841		25 Persaha	54.116.000	Persaha	-	Persaha		15 Perusa	37.130.000	10 Perusa	13.906.000	25 Perusah	51.036.000	100	94	25,00	51.036.000	10	108.956																	
2.01	2.01.1	1	04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	60 Orang	49.829		60 Orang	69.520.000	Orang	-	Orang		-	60 Org/Perus	68.320.000	60 Org/Perus	68.320.000	100	98	60,00	68.320.000	100	137.109																		
2.01	2.01.1	1	05	Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak dan penetapan UMK	33 Persahaan	39.927		30 Persaha	76.980.000	Persaha	-	Persaha		30 Perusa	55.280.000		17.849.500	30 Persha	73.129.500	100	95	30,00	73.129.500	91	183.158																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				97		307.819.500,000																					

Dari table di atas diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan total anggaran Rp 20,050,000 Terealisasi Rp 20.050.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 19.200.000 Terealisasi Rp. 15.162.228 dengan persentase 79% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 16.600.000 Terealisasi Rp. 16.600.000 dengan persentase 100 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan total anggaran Rp. 81.960.000. Terealisasi Rp. 81.789.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan total anggaran Rp. 39.000.000 Terealisasi Rp. dengan persentase 86 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 86 %
6. Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor, dengan total anggaran Rp. 3.000.000 Terealisasi Rp. dengan persentase 3.000.000 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan total anggaran Rp. 49.579.000 Terealisasi Rp. 48.000.000 dengan persentase 97% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%
8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan total anggaran Rp. 20.007.00 Terealisasi Rp. 19.985.500 dengan persentas 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan total anggaran Rp. 84.250.000 Terealisasi Rp. 81.005.000 dengan persentase 96 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 96 %
10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan total anggaran Rp. 74.790.000 Terealisasi Rp. 69.510.000 dengan persentase 93% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 93%

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan total anggaran Rp 50.000.000 Terealisasi Rp 49.900.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 73.150.000 Terealisasi Rp. 68.000.000 dengan persentase 93% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 10.145.000 Terealisasi Rp. 10.145.000 dengan persentase 100 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan total anggaran Rp. 21.600.000 Terealisasi Rp. 21.474.772 dengan persentase 99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Kantor, dengan total anggaran Rp. 75.950.000 Terealisasi Rp. 62.650.000 dengan persentase 82% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dengan total anggaran Rp 20.400.000 Terealisasi Rp 20.400.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Rp 10.200.000 Terealisasi Rp. 10.200.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan total anggaran Rp 25.000.000 Terealisasi Rp 25.000.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan total anggaran Rp 16.000.000 Terealisasi Rp 16.000.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan total anggaran Rp 92.750.000 Terealisasi Rp 90.000.000 dengan persentase 97% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

4. Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD, dengan total anggaran Rp 31.000.000 Terealisasi Rp 31.000.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

E. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Penyusunan Data Base tenaga kerja daerah, dengan total anggaran Rp 23.983.000 Terealisasi Rp 23.975.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, dengan total anggaran Rp 181.050.000 Terealisasi Rp 180.208.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja, dengan total anggaran Rp 16.670.000 Terealisasi Rp 11.545.000 dengan persentase 69% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

F. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dengan total anggaran Rp 65.885.000 Terealisasi Rp 59.032.000 dengan persentase 90% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, dengan total anggaran Rp 174.980.000 Terealisasi Rp 172.880.000 dengan persentase 99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS), dengan total anggaran Rp 16.655.000 Terealisasi Rp 16.515.000 dengan persentase 99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

G. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1. Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja, dengan total anggaran Rp 35.700.000 Terealisasi Rp 35.530.000 dengan persentase 99,52% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan total anggaran Rp 80.330.000 Terealisasi Rp 79.804.500 dengan persentase 99,34% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan total anggaran Rp 54.116.000

Terealisasi Rp 51.036.000 dengan persentase 94,30% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

4. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan, dengan total anggaran Rp 69.520.000 Terealisasi Rp 68.320.000 dengan persentase 98,27% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
5. Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan total anggaran Rp 76.980.000 Terealisasi Rp 73129500 dengan persentase 94,99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %.

Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua Kegiatan Rata-rata 100 % Pengukuran Kinerja kegiatan (PKK) diatas menunjukkan bahwa sasaran yang diinginkan pada tahun 2018 telah memenuhi target. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian Kegiatan/ Program/ Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.289.501.184.82,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.185.149.260,- atau 97%.

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator Kinerja Ketersediaan Data base tenaga kerja daerah target 1 Dokumen , Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina dengan target 14 LPTKI dan Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan 40 Orang dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.

Untuk sasaran strategis Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator Kinerja jasa iklan radio dan cetak iklan target 1 Dokumen , Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Peningkatan Mutu Standar ISO dengan target 1 kegiatan , Jumlah PPTKIS yang dibina dan Jumlah tenaga kerja mandiri TKM dengan target 50 tenaga kerja Mandiri (TKM) dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

Dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan ditetapkan tujuan sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan indikator kinerja jumlah perusahaan yang dibina dengan target 12 perusahaan, Jumlah Pekerja Anak yang disurvey target 120 Anak, Jumlah perusahaan yang dibina norma kerja target 15 perusahaan, jumlah peserta sosialisasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan target 60 orang peserta kegiatan target 80 Orang dan indikator kinerja jumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan target 60 orang kesemuanya dapat dipenuhi sesuai target. dan tujuan sasaran strategis Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan indikator kinerja jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama target 4 kasus, Tersedianya dokumen penetapan nilai kehidupan layak target 1 dokumen dan Meningkatnya falitas operasional dewan pengupahan

dengan target 11 Orang dapat dipenuhi sesuai target yang di tentukan. Untuk lebih jelastarget dan realisasi atas tujuan sasaran dan indikator kinerja dinas tenaga kerja kota bima pada table berikut :

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA**

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketersediaan Data base tenaga kerja daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina	14 LPTKI	14 LPTKI	100%
		Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan	40 Orang	40 Orang	100%
2	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	jasa iklan radio dan cetak iklan	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja	100 Orang	100 Orang	100%
		Kegiatan Peningkatan Mutu Standar ISO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Jumlah PPTKIS yang dibina	9 PPTKI	9 PPTKI	100%
		Jumlah tenaga kerja mandiri TKM	50 TKM	50 TKM	100%
3	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;	jumlah perusahaan yang Di bina	12 Perusahaan	12 Perusahaan	100%
		Jumlah Pepekerja Anak	120 anak	120 anak	100%
		jumlah perusahaan yg di periksa K3	15 perusahaan	15 perusahaan	100%
		jumlah peserta sosialisasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja	60 orang	60 orang	100%
		jumlah perusahaan peserta sosialisasi BPJS	80 Orang	80 Orang	100%
		jumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	60 Orang	60 Orang	100%

4	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	4 kasus	5 kasus	150%
		Tersedianya dokumen penetapan nilai kehidupan layak	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Meningkatnya fasilitas operasional dewan pengupahan	11 Orang	11 Orang	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dapat diukur melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan, penetapan kinerja pelayanan OPD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Analisa Kinerja Pelayanan OPD Dinas Tenaga kerja Kota Bima adalah Analisis terhadap Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan.

Pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM : besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2018 adalah 40 orang besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja Mandiri (TKM), target tahun 2018 adalah 50 Orang; Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM : besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2018 adalah mencapai 54%. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2018 adalah 100% Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM : besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2018 adalah mencapai 50%.
2. Terhadap Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan, indikator SPM bukan sepenuhnya merupakan kewenangan Kota Bima karena sudah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi, namun demikian pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tetap dilakukan oleh dinas tenaga kerja kota bima.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah pengangguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Minimnya perlindungan hukum;
5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;
6. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;
7. Penganggur atau pencari kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, diantaranya adalah: belum tersedianya gedung dan instruktur pelatihan BLK, terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

Isu Strategis Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;

2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Cakupan masalah yang luas; 1. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif; 2. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kota Bima; 3. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan; 4. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu. Permasalahan menurut stakeholders : 1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal; 2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal; 3) Kurang link and match-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja; 4) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourcing, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur; 6) Tingginya angka kecelakaan kerja; 7) Tingginya pelanggaran norma kerja; 8) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara.

Agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan *NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN*, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel

RPJPD 2015-2005 dan RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi NTB adalah Pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju, dan sejahtera dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana cita-cita otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, keadilan, kemandirian dan kemajuan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat di bidang tenaga kerja adalah menyediakan lapangan kerja, diarahkan untuk:

1. Mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.
3. Meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMD NTB Tahun 2013-2018, adalah: Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja dimaknai melalui kebijakan peningkatan BLK, KKK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2020 menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut :.

TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		
5	6	7	8	10	11	12	14	15	16		
1). Meningkatkan kesempatan kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang terserap pada dunia usaha dan dunia kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal	a.Persentase angkatan kerja yang terserap pada sektor formal	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya Data Base Ketenagakerjaan yang valid dan informative	Dokumen data base ketenagakerjaan yang by name by adress		
						b.Persentase tenaga kerja yang ditempatkan pada sektor formal di LN	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga kerja baru yang memiliki keahlian dan keterampilan		
						Pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola LPTKS	Jumlah pengelola LPTKS dibina			
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Informasi ketenagakerjaan yang disampaikan melalui media massa	
										Terlaksananya Job Fair	Jumlah kontrak kerja yang disepakati
										Terlaksananya Sosialisasi AK1 pada Perguruan Tinggi dan SMA/SMK	Jumlah peserta sosialisasi
										Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pelayanan dengan Standar ISO:9001 2015	Jumlah layanan yang tersertifikasi ISO:9001 Tahun 2015

							Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah penerima informasi penempatan tenaga kerja LN
							Pemberian Fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro	jumlah usaha kecil mikro yang dilatih
							Kegiatan Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola PPJMI	Jumlah Pengelola PPJMI yang dilatih
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Meningkatnya cakupan perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	a. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Jumlah LPTK yang dimonitoring dan evaluasi
						b. Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian perselisihan HI	Terlaksananya mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
						c. Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	Pendampingan dan Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup Layak	Dokumen KHL
							-	Penyediaan Fasilitas Dewan Pengupahan daerah	Terfasilitasinya Dewan Pengupahan
							-	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja dan K3	Jumlah perusahaan yang dibina

								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Norma Kerja dan K3	Jumlah perusahaan yang dimonev
								Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dimonev
							Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan	Jumlah peserta Bimtek
							Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya Operasi Justisi Ketenagakerjaan Kota Bima	Jumlah cakupan wilayah operasi

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis dari pada Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia.

secara rinci masing-masing program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - b. Pengadaan Pakaian Olah Raga
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - d. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - e. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - f. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
 - c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- a. Pembinaan Hubungan Industrial bagi pengusaha dan pekerja
 - b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - c. Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
 - d. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - e. Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja
 - f. Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja

MATRIKS RENJA SKPD DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA BIMA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome dan Kegiatan Output)	ANGGARAN TAHUN 2020			PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021			LOKASI				
							Target	Rp (dalam Jutaan)	Sumber Dana	Target	Rp (dalam Jutaan)						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
Meningkatnya akuntabilitas OPD	Meningkatnya Kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi OPD	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	01	2.01.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	982,034	APBD	100%	1,059,028	Kota Bima			
			2	01	2.01.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat Masuk dan yg dikirm selama setahun	1,117	Surat Masuk/ Keluar	52,682	APBD	1,229	Surat Masuk/ Keluar	55,843	
			2	01	2.01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	Bln	36,252	APBD	12	Bln	38,427	
			2	01	2.01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yg layak	8	Unit	23,426	APBD	8	Unit	24,832	
			2	01	2.01.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pegawaiia Yg Memperoleh Jasa administrasi keuangan	8	Org	94,891	APBD	8	Org	100,585	
			2	01	2.01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan	11	Org	71,550	APBD	11	Org	75,843	
			2	01	2.01.01	01	09	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	6	Unit	8,904	APBD	6	Unit	9,438	
			2	01	2.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	12	Bln	52,554	APBD	12	Bln	55,707	
			2	01	2.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yg dicetak dan digandakan	67,063	Lbr	31,701	APBD	70,416	Lbr	33,604	
			2	01	2.01.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	65	Unit/ Buah	78,440	APBD	68	Unit/ Buah	83,146	
			2	01	2.01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerja sama dengan media	9	Media	69,218	APBD	9	Media	73,371	
			2	01	2.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum Rapat	12	Kali	10,600	APBD	14	Kali	11,236	
			2	01	2.01.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25	Kali	351,815	APBD	26	Kali	386,997	
			2	01	2.01.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10	Kali	100,000	APBD	12	Kali	110,000	

	Meningkatnya sarana dan prasarana	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur Sipil Negara	2	01	2.01.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	279,285	APBD	100%	59,714	Kota Bima	
			2	01	2.01.01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	2	Unit	40,000	APBD	-	-	
			2	01	2.01.01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11	Unit/ Buah	85,000	APBD	-	-	
			2	01	2.01.01	02	10	Pengadaan Mbeleur	Tersedianya Lemari / Kursi dan Meja (Mebeleur)	-	-	-	APBD	-	-	
			2	01	2.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	29,700	APBD	1	Unit	
			2	01	2.01.01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipeliharaan	8	Unit	24,585	APBD	8	Unit	
			2	01	2.01.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi	1	Unit	100,000	APBD	-	Unit	
	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat Persentase Disiplin Aparatur Sipil Negara	2	01	2.01.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	52,000		100%	-	Kota Bima	
			2	01	2.01.01	03		Pengadaan pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Jumlah Pegawai yang memperoleh Bantuan Kain Keki				APBD			
								- Pakaian Keki		20	Org	14,000	APBD	-	-	
								- Pakain Hitam Putih		14	Org	7,000	APBD	-	-	
								- Pakaian Tenun Ikat		34	Org	14,000	APBD	-	-	
			2	01	2.01.01	03		Pengadaan pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang memperoleh Baju Olahraga	34	Org	17,000	APBD	-	-	
	Meningkatnya Kualitas Penyajian Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	2	01	2.01.01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LKIP OPD	A		267,439		A	294,183	Kota Bima
			2	01	2.01.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja OPD sesuai	4	Lap	93,000	APBD	4	Lap	
			2	01	2.01.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen / Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Lap	31,130	APBD	1	Lap	
			2	01	2.01.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Lap	24,509	APBD	1	Lap	
			2	01	2.01.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA), Dokumen Rencana Kerja dan Dokuman	4	Dok	75,900	APBD	4	Dok	
			2	01	2.01.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen / laporan Akuntabilitas Kinerja instansi dan Laporan Penyelenggaraan	2	Dok	42,900	APBD	2	Dok	

Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase angkatan kerja yang terserap pada dunia usaha dan dunia kerja	2	01	2.01.01	15		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. persentase angkatan kerja yang terserap pada sektor formal b. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan pada sektor formal di Luar Negeri	40% 15%	829,700	APBD	42% 17%	911,510	Kota Bima		
			2	01	2.01.01	15	01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan		36,300	APBD		39,930			
									- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Dokumen data base ketenagakerjaan	1	Dok	36,300	APBD	1	Dok	39,930
			2	01	2.01.01	15	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya Pelatihan ketrampilan Tenaga Kerja		775,000	APBD		852,500			
									- Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Kompetensi	50	Orang	775,000	APBD	50	Orang	785,000
			2	01	2.01.01	15	10	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	Terbinanya dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta		18,400	APBD		19,080			
									- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan tenaga kerja swasta yg dibina	12	Lembg	18,400	APBD	12	Lembg	19,080
			2	01	2.01.01	16		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	97%	509,204	APBD	100%	581,836	Kota Bima		
									Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	95%							
			2	01	2.01.01	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja		227,056	APBD		249,762			
						- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja	Informasi ketenagakerjaan yang disampaikan melalui media massa	40	informasi	58,300	APBD	45	Informasi	64,130			
						- Pelaksanaan job fair	Jumlah kontrak kerja yang disepakati	200	kontrak	52,136	APBD	250	kontrak	57,350			
						- Sosialisasi AK1 pada perguruan tinggi dan SMA/SMK	Jumlah peserta sosialisasi	760	peserta	41,930	APBD	800	peserta	46,123			
						- Peningkatan Mutu Pelayanan dengan Standar ISO:9001 2015	Jumlah layanan yang tersertifikasi ISO:9001	5	layanan	74,690	APBD	5	Layanan	82,159			
2	01	2.01.01	16	03	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri		37,466	APBD		41,213						
						- Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri	Jumlah Peserta Kejiata Sosialisasi	117	Orang	37,466	APBD	120	Orang	41,213			
2	01	2.01.01	16	06	Pemberian Fasilitas dan mendorong sistim Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Terbina dan Terfasilitasinya Tenaga Kerja Mandiri		194,799	APBD		224,018						
						Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Jumlah TKM yang Dibina dan terfasilitasi	50	Orang	194,799	APBD	60	Orang	224,018			
2	01	2.01.01	16	08	Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Terlaksananya pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)		16,655	APBD		18,321						
						- Kegiatan Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Jumlah perusahaan yang dibina	10	Perusahaan	16,655	APBD	12	Perusahaan	18,321			

Meningkatnya cakupan perlindungan tenaga kerja berdasarkan Norma kerja dan K3	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	2	01	2.01.01	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1).Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	15 %		259,918	APBD	15 %	285,910	Kota Bima		
								2).Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 %					65 %			
									3). Persentase perusahaan yang melaksanakan UMK	20 %					20 %		
		2	01	2.01.01	17	01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja			8,650	APBD		9,515			
							Monitoring dan Evaluasi LPTK	Jumlah LPTK yang dimonev	12	LPTK	8,650		12	LPTK	9,515		
		2	01	2.01.01	17	02	Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial			80,000	APBD		88,000			
							- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	12	Kasus	80,000	APBD	12	Kasus	88,000		
		03	01	2.01.01	17	03	Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya Pendampingan dan Penyelesaian prosedur Pemberian Perindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			116,356	APBD		127,992			
							- Kegiatan Penyusunan Dokumen Penetapan Kehidupan Lavak	Dokumen KHL	1	Dok	22,500	APBD	1	Dok	24,750		
							- Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah	Terfasilitasinya Dewan Pengupahan Daerah	11	orang	44,956	APBD	11	orang	49,452		
							- Pembinaan dan pengawasan Norma Kerja dan K3	Jumlah perusahaan yang dibina	50	pers	26,300	APBD	50	pers	28,930		
							- Monitoring dan evaluasi Norma Kerja dan K3	Jumlah perusahaan yang dimonev	30	pers	5,650	APBD	30	pers	6,215		
							- Pembinaan dan pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina	50	pers	11,300	APBD	50	pers	12,430		
							- Monitoring dan Evaluasi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dimonev	30	pers	5,650	APBD	30	pers	6,215		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima ini yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima 2018-2023, sehingga target indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020. Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari kesempurnaan/sesuai yang diharapkan maka saran dan pendapat sangat dibutuhkan, terima kasih.

Kota Bima, April 2019
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Drs. Jufiri, M.Si
NIP. 19591231 198505 1 010